



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUB UNIT KERJA : BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SETYO IRAWAN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3. NHK : 266240

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/195 m2 di SEMARANG, WARISAN Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/60 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 228.000.000**

1. MOTOR, HONDA FIT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 22.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 211.076.334**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.161.576.334**

III. HUTANG **Rp. 1.500.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 1.160.076.334**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **26 Desember 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.